

Memoria Passionis

**DIALOG NASIONAL PAPUA
sebuah kisah “MEMORIA PASSIONIS”**

**oleh
J. Budi Hernawan ofm
Theo van den Broek ofm**

**Sekretariat Keadian dan Perdamaian
Keuskupan Jayapura**

**Jayapura
Maret 1999**

DIALOG NASIONAL PAPUA sebuah kisah “MEMORIA PASSIONIS”

(kisah ingatan penderitaan sebangsa)

Jumat, 26 Februari 1999 telah dicatat sebagai momentum bersejarah bagi bangsa Papua dan juga bagi sejarah Indonesia karena pada saat itulah terjadi pengungkapan aspirasi bangsa Papua kepada Presiden RI BJ. Habibie secara damai, terhormat, bebas, dan jujur. Aspirasi itu menyangkut keinginan bangsa Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI karena selama 35 tahun lebih bangsa Papua mengalami proses pembangunan yang tidak manusiawi dan karena proses integrasi dengan RI dinilai cacat hukum. Pernyataan demikian disampaikan dalam rangka “Dialog Nasional”.

Suasana Pra-Dialog Nasional

Menengok ke belakang, ada dua unsur suasana yang mengkondisikan terjadinya peristiwa Dialog Nasional itu.

Pertama, unsur ekstern sebagai titik awal. Unsur ini terdiri dari drama kejatuhan Soeharto akibat tekanan ekonomi, pergumulan elit nasional, dan tekanan gerakan reformasi mahasiswa. Jatuhnya Soeharto mengakibatkan segala aspirasi bebas dilontarkan, termasuk aspirasi kemerdekaan bangsa Papua.

Kedua, unsur intern sebagai kelanjutan. Unsur ini adalah pecahnya serangkaian aksi demo bermuatan politis di lima ibukota kabupaten di tanah Papua. Melalui aksi-aksi itu masalah Papua membedakan dirinya dengan isu reformasi di tingkat nasional. Aksi-aksi semula masih terfokus pada tuntutan pemberantasan KKN, tuntutan SI-Istimewa, dan pembentukan pemerintahan transisi sedangkan aksi-aksi awal bulan Juli lebih mulai mengutarakan tuntutan untuk menata diri dan mengatur rumah tangga sendiri.

Dialog Nasional ini merupakan jawaban Pemerintah atas tuntutan tadi dan disarankan oleh TPF-DPR RI, pimpinan Abdul Gafur, setelah berkunjung ke Irian Jaya bulan Juli 1998. Gagasan itu segera berubah menjadi bola salju di tingkat regional. Perhatian rakyat, kalangan akademisi, pihak pemerintah, pihak militer, kelompok-kelompok pemerhati masalah kemanusiaan, sampai dengan kelompok OPM, tertuju kepada proses perencanaan hingga terlaksananya Dialog itu.

Sementara waktu diskusi berkembang sekitar pilihan politis atas O-F-M (Otonomi-Federasi-Merdeka). Bersamaan dengan bergulirnya masalah itu, terjadi pula represi kepada sejumlah orang (Theys Eluay cs.) yang menyuarakan aspirasi M karena dicap makar. Muncul berbagai tokoh adat yang bersuara atas nama masyarakat adat tertentu untuk mendukung pilihan O seluas-luasnya. Pihak pemerintah daerah Tk. I dengan getol menyuarakan bahwa pilihan M adalah suara segelintir orang. Dengan demikian suasana kemasyarakatan cenderung didominasi oleh isu politis.

Di tengah-tengah pergumulan itu berdirilah FORERI (Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian) yang melingkupi pelbagai lapisan masyarakat: tiga gereja (GKI, GKII, Gereja Katolik), kalangan perempuan, kelompok mahasiswa, kelompok NGO, kelompok lembaga masyarakat

adat; misinya: menjadi tempat pertemuan hingga mampu menampung dan menyalurkan segala aspirasi yang ada dalam masyarakat. Karena FORERI didirikan oleh pelbagai lapisan masyarakat, wadah ini dinilai tepat kedudukannya untuk diandalkan sebagai negosiator dan mediator Dialog Nasional ini bersama pihak yang berwenang. Akhirnya terjadilah Dialog Nasional pada tanggal 26 Februari 1999. Syukurlah, karena memang sewajarnya “sejarah bangsa Papua” layak dilayani dengan adanya dialog sedemikian.

Menyelami sejarah sunyi bangsa Papua

Sebaiknya kita menyimak sejarah itu sejenak. Jika kita tanpa prasangka mengunjungi pelosok-pelosok tanah Papua: Wamena, Paniai, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Mindiptana, Timika, Arso, Mamberamo, dst., maka dengan mudah kita akan mendengar kisah-kisah sejarah penderitaan yang keluar dari mulut masyarakat biasa. Ingatan rakyat dengan tajam dan jernih mencatat rekaman peristiwa-peristiwa ini: “Di sungai ini kami punya bapa dibunuh; di lereng gunung itu dulu ada sejumlah kampung yang dikasih habis sama ABRI; di lapangan itu tete moyang kami dulu dipaksa untuk membakar koteka karena dianggap primitif; gunung itu dulu kami punya sekarang orang sudah kasih rusak kami punya mama; dulu kami gampang cari binatang di hutan tapi sekarang kami tidak boleh masuk karena katanya milik perusahaan yang dilindungi Undang-undang negara; kami punya anak tidak bisa maju karena guru-guru di sekolah hampir tidak ada, susah dapat obat karena mahal; dsb. dst.” Cerita-cerita ini tidak pernah dibukukan, tetapi diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nada dasar segala ungkapannya: **kami dinilai bukan manusia**. Artinya, kami tidak diperlakukan sebagai manusia tetapi sebagai obyek: obyek kebijakan politik, obyek operasi militer, obyek pengembangan ekonomi, obyek turisme, dsb. Itulah sudah.

Secara sedikit lebih sistematis sejarah sunyi itu kami dapat kaitkan dengan beberapa unsur pokok yang mewarnai kehidupan masyarakat biasa sehari-hari, seperti HAM, Kebudayaan, Transmigrasi, Ekonomi dan SDM.

Pertama. Suasana HAM di tanah Papua memprihatinkan. Kenyataan seperti peristiwa PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969 sungguh dicatat dalam ingatan kolektif bangsa Papua sebagai suatu bentuk pelanggaran haknya. Kemudian ada banyak peristiwa yang membekas dalam hati sanubari orang. Jika mau setia pada identitas kultural (tatanan sosial, tatanan kepemimpinan, tatanan hak-kewajiban) yang diwarisinya sebagai pegangan hidup, rakyat sering dinilai oleh pihak pemerintah seakan-akan menolak pembangunan. Rakyat juga sering terjepit antara ikatan kekeluargaan pada masyarakatnya sendiri yang dicap OPM dan tuntutan pihak pemerintah dan ABRI. Beberapa laporan menyangkut pelanggaran HAM (Aug. 1995, Mei 1998, Oktober 1998) sudah diterbitkan, namun suatu investigasi independen untuk menyingkapkan semua bukti yang masih ada, belum dilakukan. Kami yakin bahwa banyak pengalaman yang sangat pahit hidup dalam lubuk hati orang sederhana dan yang tak berdaya berhadapan dengan pihak-pihak yang berkuasa. Dengan demikian selama puluhan tahun, struktur mental bangsa Papua dididik dalam ketakutan.

Kedua. Kebudayaan orang Papua dipersempit oleh pihak luar menjadi hasil kesenian

serta kerajinan tradisional semata-mata. Kebudayaan tidak dilihat sebagai sebuah filsafat hidup yang lengkap dengan persepsi terhadap dunia dan sejarahnya. Aspek-aspek seperti pandangan terhadap alam yang membuat kelestarian lingkungan hidup terjaga secara tradisional, egalitarisme yang mendasari relasi antar pihak dan antar pribadi, sistem pertanian yang adaptif terhadap keadaan alam pegunungan, dsb.- semuanya selayaknya dikembangkan secara serius. Namun, hambatan-hambatan seperti sekat-sekat sukuisme, pengaruh miras, kurangnya penghargaan terhadap perempuan, dsb.- semuanya menjadi contoh sisi-sisi budaya yang harus dikikis.

Ketiga. Arus transmigrasi -baik yang terencana maupun yang spontan- di tanah bangsa Papua de facto telah mengakibatkan suatu pergeseran komposisi penduduk yang sangat serius. Dilihat dari segi jumlah penduduk bangsa Papua telah (atau tidak jauh dari) dijadikan suatu minoritas di tanahnya sendiri. Disamping itu kedatangan banyak transmigran lebih mendatangkan dampak negatif daripada pengaruh positifnya. Bukan rahasia lagi bahwa banyak warga trans terlantar karena prasarana jalan, jembatan, jaringan air minum sehat, fasilitas kesehatan, termasuk fasilitas peribadatan, dsb. tidak tersedia secara memadai. Banyak trans meninggalkan lahan dan menjadi buruh di pabrik kelapa sawit atau pabrik pengolahan kayu. Namun soal yang lebih mendasar adalah semakin terbangunnya kesenjangan antara penduduk asli dengan warga trans -lebih-lebih dengan mereka yang menetap di kota- yang berakar pada ketidakseimbangan kemajuan ekonomi, tidak adanya proses integrasi budaya pendatang dengan budaya asli, perbedaan agama. Kesenjangan-kesenjangan di berbagai segi itu menjadi potensi-potensi konflik yang rawan; apalagi ditambah pada perasaan serta kekecewaan masyarakat adat terhadap pemerintah yang begitu saja mengambil alih tanah-tanah adat tanpa mempedulikan rasa keadilan masyarakat. Dengan dalih legalistik dan ideologis: bahwa tanah dikuasai negara, bahwa pembangunan nasional harus didahulukan, maka pemerintah menguasai tanah-tanah adat yang dalam sistem budaya Papua bukanlah sebuah komoditi melainkan warisan budaya bangsa. Inilah yang menjadi salah satu trauma.

Keempat. Sumber daya alam tanah bangsa Papua dalam jumlah yang sangat berarti dihisap oleh kekuatan pemodal sehingga keuntungan positif hampir tidak dirasakan oleh orang Papua sebagai tuan rumah. Perusahaan-perusahaan yang ada di tanah Papua hampir semua bersifat ekstraktif: kayu gelondongan, kayu lapis, kayu gaharu, perkebunan kelapa sawit, perikanan skala besar, tambang-tambang emas dan tembaga, sehingga tidak menumbuhkan struktur ekonomi rakyat yang berdaya saing. Sikap kewirausahaan (*entrepreneurship*) rakyat setempat kurang dikembangkan, sedangkan sekali lagi mereka kehilangan tanah karena 'dikonsesikan' kepada perusahaan-perusahaan ekstraktif.

Kelima. Sumber daya manusia Papua kurang dikembangkan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Jika kita menyempatkan diri untuk beberapa saat hadir di kampung-kampung pedalaman Papua, maka dengan mudah akan melihat SD-SD (sebagai pondasi pendidikan) yang nyaris roboh, satu dua guru harus mengajar di 6 kelas, atau mendengar keluhan guru yang gajinya terus terlambat beberapa bulan, orangtua yang tidak peduli dengan pendidikan anak-anaknya, buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan kurikulum yang ditentukan. Jika di tingkat dasar saja, pendidikan tidak beres bisa dibayangkan di tahapan berikutnya. Selain pendidikan, layanan kesehatan masyarakat juga sulit dijangkau oleh rakyat biasa. Dokter atau malahan kehadiran seorang mantri yang terampil lagi siap melayani adalah sebuah

kemewahan di pedalaman.

Kenyataan-kenyataan seperti disinggung di atas tersusun selama puluhan tahun dan menggelora sebagai sejarah bangsa Papua. Sejarah ini tidak pernah menjadi sejarah resmi bangsa yang diajarkan di sekolah-sekolah. Rangkaian peristiwa itu ‘hanya’ menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa Papua. Ingatan itulah yang diwariskan turun-temurun, yang berarti juga pewarisan trauma-trauma korban. Ingatan itu mengandung energi, tenaga, kekuatan yang terkumpul hari demi hari. Seorang teolog (Johann Baptist Metz) pernah melukiskan bobot ingatan akan sejarah ini dengan memakai istilah “*memoria passionis*”, ialah “ingatan penderitaan”. *Memoria Passionis* itu bagaikan magma yang tersembunyi dari pandangan mata biasa tetapi menyimpan energi laten yang dahsyat dan siap menjungkirbalikkan segala status quo yang ada. Terbukti, dengan hembusan angin gerakan reformasi mahasiswa, magma itu mulai lepas dari keang.

Manifestasi awal masih bersifat kasar terlihat dari demo-demo bermuatan politis Juli 1998 di lima ibukota kabupaten di tanah Papua. Namun, dalam tahap berikutnya, manifestasi “*memoria passionis*” menjadi semakin halus dan bermartabat dengan momentum Dialog Nasional. Momentum itu menjadi langkah awal yang mutlak perlu sebagai jalan damai untuk mengeluarkan isi hati, melampiaskan segala emosi, dan membebaskan diri dari beban berat yang selama ini tersimpan dalam “ingatan penderitaan” saja.

Dialog-dialog lebih lanjut

Langkah awal sudah! Syukurlah. Sekarang menjadi pertanyaan: bagaimana selanjutnya? Dengan diterimanya aspirasi bangsa Papua di Istana negara itu, tingkatan masalahnya sudah bukan lagi gerakan separatis atau pemberontakan bersenjata. Tingkatan yang dijalankan sekarang adalah diplomasi yang terhormat dan bermartabat. Citra ini sebaik-baiknya dipertahankan oleh setiap rakyat Papua yang menghendaki proses pengungkapan dan penyelesaian “*memoria passionis*” ini berjalan damai dan terhormat. Selain itu, citra itu hendaknya juga dijaga oleh pihak pemerintah yang telah secara bijaksana dan terbuka mendengarkan aspirasi bangsa Papua. Jika salah satu pihak tidak menahan diri dan menjaga citra ini, kemungkinan besar proses dialog lanjutan tertutup dan jatuh ke dalam kekerasan.

Ungkapan di depan Presiden Habibie itu barulah awal proses. Dan dengan sangat tepat kita semua diundang Bapak Presiden untuk merenungkan baik-baik isi ungkapan pengalaman itu. Maka, suatu proses panjang masih terbentang di hadapan kita. Bagaimana kita dapat melangkah lebih lanjut? Kami ingin mencatat sejumlah gagasan/saran yang mungkin dapat dimanfaatkan.

[1] **Pertama-tama** kita perlu menyadari bahwa untuk proses lebih lanjut jauh lebih banyak waktu dibutuhkan daripada yang telah tercantum dalam acuan kesepakatan yang sedang berlaku (yakni pelaksanaan bagian kedua Dialog Nasional berupa seminar pada akhir bulan Maret ini). Mengingat pentingnya dialog lanjutan ini, jadwal yang sudah ditetapkan sebaiknya ditinggalkan saja, dan disiapkan waktu secukupnya supaya proses berdialog betul-betul dapat dijalankan.

[2] **Kedua**, kami berpendapat bahwa suatu sosialisasi mengenai apa yang terjadi selama ini diberi perhatian penuh agar informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat luas betul-betul tepat dan sesuai dengan kenyataan. Setelah diungkapkan aspirasi terdalam bangsa Papua di depan Presiden Habibie, kiranya perlu disadari bahwa peristiwa itu perlu diketahui oleh segenap bangsa Papua hingga di pelosok-pelosok. Kenyataan menunjukkan bahwa informasi yang tersaji lewat media massa tidak selalu bisa dijangkau dan dipahami secara tepat oleh masyarakat biasa. Bahasanya tidak selalu mudah dimengerti; pemihakan atau penyimpangan dalam pemberitaan tidak selalu disadari; informasi yang diterima masyarakat kadangkala sepotong-potong saja; dst. Karenanya, FORERI sebagai pihak yang sampai saat ini dipercaya masyarakat Papua kiranya patut menyebarkan informasi mengenai seluruh rangkaian peristiwa Dialog Nasional secara sederhana, jernih, dan akurat agar seluruh masalah dimengerti secara sama hingga di wilayah pedalaman.

[3] **Ketiga**, mengikuti proses penyebaran informasi itu, kiranya patut diciptakan ruang-ruang refleksi pada masyarakat luas. Ruang-ruang refleksi ini menjadi keperluan mendesak untuk mengolah ingatan kolektif bangsa menjadi sebuah visi bersama. Ungkapan pengalaman yang diwarnai emosi harus diangkat dan diolah menjadi sebuah visi bersama. Refleksi yang kami maksudkan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan bobot pada segala dialog maupun pada pilihan arah agenda politik selanjutnya. Apalagi refleksi ini tidak boleh dibatasi pada segelintir orang di kota namun perlu difasilitasi akan melibatkan banyak orang di wilayah masing-masing. Partisipasi luas masyarakat akan menentukan bobot keberhasilan dialog di kemudian hari.

Di sinilah peran FORERI kembali diharapkan. FORERI kiranya perlu menyajikan suatu kerangka acuan yang sederhana sekaligus menyeluruh bagi terciptanya ruang-ruang refleksi di tingkat masyarakat yang paling biasa. Seandainya suatu seminar diselenggarakan pada bulan Maret, alangkah baiknya seluruh perhatian seminar ditujukan kepada [a] penyusunan informasi yang tepat lagi sederhana, dan [b] perumusan acuan refleksi guna menunjang partisipasi masyarakat didalam proses refleksi selanjutnya. Kerangka berefleksi ini mutlak perlu agar lembaga-lembaga adat sebagai wadah yang sah dan berwibawa untuk berdialog intern, mampu menjalankan fungsi itu secara lebih terarah dan berkesinambungan. Dalam proses berefleksi itu, gereja-gereja, kalangan NGO, kaum perempuan, kalangan mahasiswa, diharapkan akan membantu semampunya.

[4] **Keempat**. Akan tiba saatnya dialog dibuka bukan saja didalam kalangan masyarakat Papua saja namun juga dalam hubungan dengan “masyarakat non-Papua”; kenyataan bahwa terdapat penduduk selain bangsa Papua di tanah bangsa Papua sebaiknya diakui dan diberi tempat dalam dialog ini. Di situlah peran kaum intelektual baik Papua maupun non-Papua dituntut untuk mampu menjembatani dan menerjemahkan “memoria passionis” orang Papua menjadi wacana kemanusiaan universal. Penerjemahan ini mutlak perlu dengan beberapa tujuan: [a] demi terbukanya mata hati semua orang yang memiliki kepedulian terhadap sejarah bangsa Papua, [b] penyaringan kritis terhadap pengalaman masyarakat menjadi buah-buah refleksi yang seimbang dan realistik, [c] terbentuknya jalinan solidaritas Papua dengan

non-Papua berdasarkan prinsip kemanusiaan sehingga perjuangan itu bukanlah milik eksklusif bangsa Papua, dan [d] terbukanya jalan-jalan informasi bagi pihak-pihak yang ingin menyumbangkan tenaga, pikiran, dan modal bagi proses perjuangan kaum korban.

[5] **Kelima.** Hasil refleksi sekaligus aspirasi masyarakat akhirnya dijadikan bahan dialog yang terbuka dengan pihak yang berwewenang menuju suatu penyelesaian. Tahap akhir ini pastilah sulit, namun tidak dapat dihindari pihak manapun. Sesuai dengan anjuran oleh Presiden Habibie, pihak-pihak yang hendak berdialog mengenai masalah Papua hendaknya berangkat dari kenyataan dan terbuka pada sebuah perubahan. Di satu pihak, wakil rakyat Papua tentunya sebaik-baiknya berusaha meningkatkan refleksinya agar bekal untuk dialog dengan pemegang kekuasaan cukup memadai. Memadai dari segi visi maupun dari segi partisipasi rakyat Papua dalam proses refleksi yang matang. Partisipasi dan kesamaan visi ini fundamental karena secara tradisional budaya Papua tidak begitu mengenal sistem perwakilan seperti lazim dalam sistem demokrasi modern. Di lain pihak, pemerintah diharapkan untuk mampu tidak hanya mendengarkan aspirasi rakyat Papua tetapi juga mencerna buah-buah refleksi yang bermuara pada visi hidup bangsa Papua yang telah dirumuskan bersama. Dari situ diharapkan dari pemerintah dan wakil-wakil rakyat Papua untuk mencari bersama penyelesaian masalah Papua secara adil dan damai.

[6] **Akhirnya** perlu kami catat bahwa peranan yang diharapkan dari pihak FORERI bermuara pada sejumlah tuntutan terhadap pengorganisasian FORERI sendiri. Sampai saat ini transparansi organisasi FORERI masih dapat dipertanyakan; walau demikian wadah semacam FORERI sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas/misi yang tadi diharapkan dari suatu “instansi pengantara”, apalagi suatu “tempat pertemuan”, “tempat penampungan”. Misi demikian yang diklaim FORERI bukan saja menuntut dari segi keahlian (membekali diri untuk menjalankan misinya dengan terampil) melainkan juga dari segi sikap (perlu mengambil posisi yang netral -tidak memihak kubu manapun- walau sekaligus sangat terlibat dalam peningkatan bobot dialog). Dari dua segi ini FORERI sebagaimana adanya masih perlu disempurnakan. Sebaiknya “pekerjaan rumah” ini diadakan dalam waktu sangat dekat supaya proses dialog dapat dimotorinya seperlunya.

Demikianlah sejumlah catatan kami sekitar Dialog Nasional Bangsa Papua. Semoga bermanfaat!

Sekretariat Keadilan & Perdamaian, Keuskupan Jayapura Jayapura, 12 Maret 1999
Sdr. J. Budi Hernawan OFM
Sdr. Theo van den Broek OFM